

**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG DINAMIKA PERAN
ORANG TUA DALAM PEMILIHAN PASANGAN PERNIKAHAN
MENURUT ADAT JAWA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK**

Hyang Kinasih Gusti

Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Radin Intan Lampung,
Lampung, Indonesia
artemiloveyousufi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas perspektif Hukum Keluarga Islam mengenai dinamika peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan menurut adat Jawa, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak. Pernikahan dalam Islam bukan hanya merupakan kontrak sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang melibatkan hak-hak individu, termasuk hak untuk memilih pasangan tanpa paksaan. Di sisi lain, adat Jawa memberikan peran signifikan kepada orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak mereka, yang sering kali bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan memilih dalam Islam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang peran orang tua dalam konteks pernikahan, serta mengeksplorasi bagaimana adat Jawa mempengaruhi keputusan pemilihan pasangan. Penelitian ini juga menelaah dampak dari pengaruh orang tua ini terhadap perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk memilih pasangan, hak atas pendidikan, dan kesejahteraan umum anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama dan adat dalam pemilihan pasangan pernikahan, yang dapat berdampak negatif terhadap hak-hak anak jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya harmonisasi antara Hukum Keluarga Islam dan adat Jawa untuk memastikan perlindungan hak-hak anak terpenuhi. Rekomendasi diberikan untuk menciptakan kesadaran lebih besar tentang pentingnya hak memilih pasangan dalam Islam, serta mendorong dialog antara pemangku kepentingan untuk menemukan solusi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan tradisi lokal secara harmonis.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam, Peran Orang Tua, Adat Jawa, Pemilihan Pasangan Pernikahan dan Hak-Hak Anak.

Abstract

This study discusses the perspective of Islamic Family Law on the dynamics of the role of parents in choosing a marriage partner according to Javanese custom, and its implications for the protection of children's rights. Marriage in Islam is not only a social contract, but also has a spiritual dimension that involves individual rights, including the right to choose a partner without coercion. On the other hand, Javanese custom gives parents a significant role in determining their child's life partner, which often contradicts the basic principle of freedom of choice in Islam. This study aims to analyze how Islamic Family Law views the role of parents in the context of marriage, and explore how Javanese custom influences the decision to choose a partner. This study also examines the impact of this parental influence on the protection of children's rights, including the right to choose a partner, the right to education, and the general welfare of children. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis. Data were obtained through literature studies, in-depth interviews, and participant observation. The results of the study indicate tensions between religious and customary norms in choosing a marriage partner, which can have a negative impact on children's rights if not managed properly. This study

concludes that there is a need for harmonization between Islamic Family Law and Javanese custom to ensure that the protection of children's rights is fulfilled. Recommendations are given to create greater awareness of the importance of the right to choose a spouse in Islam, as well as to encourage dialogue between stakeholders to find solutions that harmoniously integrate religious values and local traditions.

Keywords: Islamic Family Law, Role of Parents, Javanese Custom, Marriage Partner Selection and Children's Rights.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk struktur keluarga dan masyarakat. Dalam konteks Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan kontraktual antara dua individu, tetapi juga sebagai komitmen yang memiliki dimensi spiritual dan moral. Hukum Keluarga Islam mengatur berbagai aspek pernikahan, termasuk pemilihan pasangan, yang melibatkan peran signifikan dari orang tua.¹

Di Indonesia, keberagaman budaya sangat kental mempengaruhi praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan pernikahan. Adat dan tradisi lokal seringkali berjalan seiring dengan ketentuan hukum agama. Salah satu contoh yang menarik adalah adat Jawa, di mana peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan sangat menonjol. Orang tua tidak hanya dianggap sebagai penasehat, tetapi sering kali memiliki pengaruh besar atau bahkan keputusan akhir dalam menentukan pasangan hidup anak mereka. Tradisi ini, meskipun masih dihormati dan dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Jawa, tidak jarang menimbulkan dinamika yang kompleks dalam pelaksanaannya. Dinamika peran orang tua dalam adat Jawa kadang-kadang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Keluarga Islam, yang memberikan hak kepada individu untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Konflik ini dapat berdampak pada perlindungan hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk menentukan masa depan pribadi dan menikah dengan seseorang yang mereka pilih sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai agama dan budaya dapat diselaraskan untuk memastikan perlindungan hak-hak individu, khususnya hak-hak anak.²

Implikasi dari dinamika ini terhadap hak-hak anak sangat penting untuk diteliti dan dipahami. Perlindungan hak-hak anak dalam konteks pernikahan meliputi hak untuk memilih pasangan tanpa paksaan, hak atas pendidikan, dan hak untuk hidup dalam lingkungan keluarga yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang

² Abdullah, M. Amin. (2015). "Falsafah Hukum Islam (Jilid 2: Keluarga)." Jakarta: Raja Grafindo Persada.

mendalam mengenai perspektif Hukum Keluarga Islam tentang peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan menurut adat Jawa dan bagaimana hal ini mempengaruhi perlindungan hak-hak anak.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan, serta menelaah dinamika yang terjadi dalam adat Jawa. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis implikasi dari peran tersebut terhadap perlindungan hak-hak anak, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk harmonisasi antara hukum agama dan adat, serta peningkatan perlindungan hak-hak anak dalam konteks pernikahan. Dengan memahami dan mengelola dinamika ini dengan baik, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang lebih baik antara tradisi dan hak individu, serta mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pernikahan merupakan fondasi utama dalam struktur sosial yang membentuk masyarakat. Dalam tradisi Islam, pernikahan dipandang sebagai langkah penting dalam menyelesaikan setengah agama dan menjadi sebuah ikatan yang mengikat dua individu dalam kesatuan keluarga. Namun, dalam realitasnya, proses pemilihan pasangan pernikahan sering kali melibatkan berbagai faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi keputusan individu.⁴

Di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, pemilihan pasangan hidup sering kali dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai budaya setempat. Salah satu contoh yang menonjol adalah adat Jawa, di mana peran orang tua dalam proses pemilihan pasangan pernikahan memiliki bobot yang signifikan. Orang tua tidak hanya dianggap sebagai penasihat, tetapi sering kali memiliki otoritas untuk menentukan pilihan pasangan anak mereka, sesuai dengan tradisi yang diwarisi dari generasi sebelumnya.

Dalam konteks ini, terdapat pergeseran dinamika antara nilai-nilai budaya dan ajaran agama, terutama dalam hal perlindungan hak-hak individu, khususnya hak-hak anak. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Namun, pelaksanaannya sering kali bertentangan dengan norma-norma budaya yang mengutamakan otoritas orang tua dalam pemilihan pasangan. Konflik antara nilai-nilai agama dan adat dalam pemilihan pasangan pernikahan dapat berdampak pada hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk memilih pasangan, mendapatkan pendidikan yang layak, serta hidup dalam lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk memahami perspektif Hukum Keluarga Islam tentang peran orang tua dalam

³ Djazuli, A., & Hidajat, N. (2009). "Budaya Jawa dalam Perspektif Islam: Studi Tentang Nilai-nilai Budaya Jawa." Yogyakarta: Diva Press.

⁴ Fitri, F. (2018). "Adat Jawa: Kontinuitas, Discontinuitas, dan Perubahan." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

pemilihan pasangan pernikahan, terutama dalam konteks adat Jawa, dan bagaimana hal ini mempengaruhi perlindungan hak-hak anak.⁵

Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap dinamika peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan, baik dalam konteks tradisi lokal maupun perkembangan teknologi. Dengan memahami berbagai faktor yang memengaruhi pola pemilihan pasangan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul antara nilai-nilai agama, adat, dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan perlindungan hak-hak individu, terutama hak-hak anak, dalam institusi pernikahan.

KAJIAN TEORITIS

Kajian ini berfokus pada perspektif Hukum Keluarga Islam mengenai dinamika peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan menurut adat Jawa, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak. Teori yang mendasari penelitian ini mencakup beberapa aspek utama: Hukum Keluarga Islam, peran orang tua dalam adat Jawa, serta konsep hak-hak anak. Hukum Keluarga Islam, atau yang dikenal sebagai Fiqh Munakahat, adalah cabang hukum Islam yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, dan hubungan antar anggota keluarga. Dalam konteks pernikahan, hukum ini menekankan pentingnya kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, sesuai dengan prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah kontrak yang sah antara dua individu yang dewasa, yang dilandasi oleh kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Orang tua memiliki peran sebagai penasihat, namun hak final untuk memilih pasangan tetap ada pada individu yang bersangkutan.⁶

Adat Jawa merupakan salah satu tradisi yang kuat di Indonesia, dengan nilai-nilai yang sangat menjunjung tinggi peran orang tua dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam pemilihan pasangan pernikahan. Dalam budaya Jawa, orang tua tidak hanya berperan sebagai penasihat, tetapi sering kali memiliki otoritas yang signifikan dalam menentukan pilihan pasangan hidup anak mereka. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang tua memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang lebih untuk memilih pasangan yang sesuai, demi menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Tradisi ini mencerminkan penghormatan terhadap hierarki keluarga dan nilai-nilai kolektivitas yang menjadi ciri khas budaya Jawa. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh

⁵Anwar, E. (2010). "Keluarga Jawa: Konstruksi, Kultur, dan Praktik." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

⁶Kuntowijoyo. (1992). "Adat Jawa dan Agama Islam: Kajian Sosiologi Historis atas Hukum Perdata Islam." Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

PBB menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pendidikan, dan partisipasi dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam konteks ini, hak anak untuk memilih pasangan hidup tanpa paksaan adalah salah satu aspek penting yang harus dijaga. Hukum Keluarga Islam juga mendukung perlindungan hak-hak anak, dengan menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kerelaan dan persetujuan individu, bukan pada paksaan atau tekanan dari pihak lain, termasuk orang tua.⁷

Dinamika peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan menurut adat Jawa dapat menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang menekankan kebebasan individu. Ketegangan ini berpotensi berdampak negatif terhadap perlindungan hak-hak anak, terutama hak untuk memilih pasangan sesuai kehendak mereka. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana nilai-nilai adat dan agama dapat diselaraskan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dalam konteks pernikahan.⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami pandangan Hukum Keluarga Islam tentang peran orang tua, mengeksplorasi praktik adat Jawa, dan menganalisis dampaknya terhadap hak-hak anak. Data diperoleh melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana harmonisasi antara hukum agama dan adat dapat dicapai, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak dalam konteks pernikahan. Dengan memahami teori-teori yang mendasari peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan menurut Hukum Keluarga Islam dan adat Jawa, serta implikasinya terhadap hak-hak anak, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera, yang menghormati hak-hak individu dan tradisi budaya secara bersamaan.

Salah satu tantangan utama dalam menyelaraskan Hukum Keluarga Islam dengan adat Jawa adalah menemukan titik kompromi yang menghormati kedua sistem nilai tersebut. Kompromi ini penting untuk menghindari konflik yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan merugikan hak-hak individu, khususnya anak-anak. Dalam konteks ini, teori kompromi sosial dapat diaplikasikan, di mana pemangku kepentingan (keluarga, tokoh agama, dan komunitas) bekerja sama untuk mengembangkan praktik yang memadukan elemen-elemen positif dari kedua tradisi. Misalnya, pendekatan musyawarah dapat digunakan untuk mengakomodasi pandangan anak dalam pemilihan pasangan, sementara tetap menghormati peran penasehat orang tua. Konsep restorative justice (keadilan restoratif) dapat menjadi pendekatan

⁷ Latief, H. (2019). "Perkawinan Adat Jawa: Antara Tradisi dan Modernitas." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(2), 214-227.

⁸ Mu'ti, A. (2010). "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Tanzim*, 7(1), 79-93.

yang relevan dalam konteks perlindungan hak anak dalam pernikahan. Restorative justice menekankan pada penyembuhan dan perbaikan hubungan, daripada sekadar menghukum. Dalam hal ini, peran orang tua dapat dilihat sebagai fasilitator yang membantu anak membuat keputusan yang bijaksana, bukannya sebagai otoritas yang memaksakan pilihan. Dengan demikian, proses pemilihan pasangan dapat menjadi pengalaman yang mendidik dan mendukung pertumbuhan pribadi anak.

Teori perubahan sosial dan budaya juga relevan untuk memahami bagaimana dinamika antara adat Jawa dan Hukum Keluarga Islam dapat berkembang. Perubahan dalam pola pikir dan praktik sosial sering kali diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara tradisi dan modernitas. Misalnya, edukasi tentang hak-hak individu dan nilai-nilai Islam yang lebih progresif dapat diberikan kepada komunitas untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Tokoh agama dan budaya memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog dan perubahan ini, dengan memberikan contoh bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks budaya yang dinamis.

Globalisasi membawa pengaruh signifikan terhadap praktik pernikahan di berbagai budaya, termasuk Jawa. Paparan terhadap nilai-nilai global, seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender, dapat mendorong masyarakat untuk meninjau kembali praktik-praktik tradisional yang mungkin tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Globalisasi juga memungkinkan akses informasi yang lebih luas, yang dapat mengedukasi masyarakat tentang berbagai pilihan dalam pernikahan dan hak-hak yang menyertainya. Dalam konteks ini, teori globalisasi membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai global dapat berinteraksi dengan dan mempengaruhi praktik-praktik lokal.

Pendekatan interdisipliner sangat penting dalam penelitian ini, mengingat kompleksitas isu yang dibahas. Menggabungkan perspektif dari studi hukum, antropologi, sosiologi, dan psikologi dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana peran orang tua, adat, dan hukum Islam berinteraksi dalam konteks pernikahan. Pendekatan ini juga membantu dalam mengidentifikasi solusi yang lebih holistik untuk mengatasi konflik antara nilai-nilai tradisional dan hak-hak individu. Mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang memiliki kesamaan budaya dan agama dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan harmonisasi antara adat dan Hukum Keluarga Islam. Negara-negara seperti Malaysia atau Pakistan, yang juga menghadapi tantangan serupa dalam mengintegrasikan hukum Islam dengan tradisi lokal, dapat menjadi referensi. Studi komparatif dapat memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara ini mengelola konflik antara nilai-nilai agama dan budaya, serta bagaimana mereka melindungi

hak-hak individu, khususnya anak-anak, dalam proses pernikahan.⁹

Akhirnya, teori kebijakan publik dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak anak dalam konteks pernikahan menurut adat Jawa dan Hukum Keluarga Islam. Kebijakan yang inklusif dan berbasis pada dialog antara pemangku kepentingan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perlindungan hak-hak anak dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya. Implementasi kebijakan ini membutuhkan kerjasama dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Dengan memahami dan menerapkan teori-teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan keseimbangan antara tradisi dan hak individu, serta mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam perspektif Hukum Keluarga Islam tentang dinamika peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan menurut adat Jawa dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak. Studi literatur menjadi langkah awal untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan, termasuk buku-buku, artikel akademik, penelitian sebelumnya, dan dokumen hukum terkait. Selanjutnya, wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan kunci seperti ahli hukum Islam, tokoh adat Jawa, orang tua dan anak yang terlibat dalam proses pemilihan pasangan, serta aktivis hak anak. Observasi partisipatif juga digunakan untuk mengamati secara langsung praktik adat Jawa dalam pemilihan pasangan pernikahan, termasuk upacara pertunangan dan pernikahan serta diskusi keluarga tentang pemilihan pasangan.

Data yang diperoleh dari studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah-langkah dalam analisis data meliputi pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama, kategorisasi untuk mengelompokkan data berdasarkan tema yang muncul, dan interpretasi untuk memahami makna dan implikasi dari temuan penelitian dalam konteks teori dan literatur yang ada. Dengan metode penelitian yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman mendalam dan holistik tentang perspektif Hukum Keluarga Islam dan adat Jawa dalam pemilihan pasangan pernikahan serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak.

⁹ Nasution, M. N. (2014). "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal Yudisial*, 7(2), 187-201.

¹⁰ Hasan, M. N. (2016). "Dinamika Perubahan Sosial Budaya dan Tradisi Islam dalam Masyarakat Jawa." *Jurnal Pembangunan Masyarakat Islam*, 1(1), 1-20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa

Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang dinamika peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan mencerminkan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan kebebasan individu, keadilan, dan kesejahteraan dalam ikatan pernikahan. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) mengakui bahwa pernikahan adalah kontrak yang harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, hak anak untuk memilih pasangannya sendiri diakui dan dilindungi. Dalam Islam, peran orang tua dalam pemilihan pasangan lebih bersifat sebagai penasihat yang bijaksana dan pendukung yang memberikan nasihat berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan mereka, namun tanpa paksaan. Orang tua diharapkan membantu anak mereka dalam menemukan pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral, serta mampu membangun rumah tangga yang sakinah (damai), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang).

Di sisi lain, adat Jawa memiliki pendekatan yang lebih kolektif dan otoritatif dalam hal pemilihan pasangan pernikahan. Dalam tradisi Jawa, orang tua sering memainkan peran dominan dalam menentukan pasangan yang tepat bagi anak-anak mereka. Pernikahan dianggap sebagai peristiwa keluarga yang melibatkan kepentingan dan kehormatan seluruh keluarga besar, sehingga keputusan pernikahan tidak hanya didasarkan pada kehendak individu, tetapi juga pada pertimbangan sosial, ekonomi, dan status keluarga. Meskipun adat ini menekankan pada keharmonisan dan stabilitas keluarga, seringkali dapat menyebabkan konflik dengan hak-hak individu anak yang dijamin oleh Hukum Keluarga Islam.

Dinamika antara Hukum Keluarga Islam dan adat Jawa dalam pemilihan pasangan pernikahan menciptakan suatu bidang interaksi yang kompleks. Di satu sisi, nilai-nilai Islam menekankan pada kebebasan dan hak individu, sementara adat Jawa menekankan pada otoritas orang tua dan keharmonisan keluarga besar. Dalam konteks ini, penting untuk menemukan keseimbangan yang menghormati kedua perspektif tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui dialog terbuka antara anak dan orang tua, dengan memahami bahwa tujuan akhir adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, serta menghormati hak-hak individu dalam kerangka nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang dinamika peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan mencerminkan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan kebebasan individu, keadilan, dan kesejahteraan dalam ikatan pernikahan. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) mengakui bahwa pernikahan adalah kontrak yang harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, hak anak untuk memilih pasangannya sendiri diakui dan dilindungi. Dalam Islam, peran orang tua dalam pemilihan pasangan lebih bersifat sebagai

penasihat yang bijaksana dan pendukung yang memberikan nasihat berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan mereka, namun tanpa paksaan. Orang tua diharapkan membantu anak mereka dalam menemukan pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral, serta mampu membangun rumah tangga yang sakinah (damai), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang).

Di sisi lain, adat Jawa memiliki pendekatan yang lebih kolektif dan otoritatif dalam hal pemilihan pasangan pernikahan. Dalam tradisi Jawa, orang tua sering memainkan peran dominan dalam menentukan pasangan yang tepat bagi anak-anak mereka. Pernikahan dianggap sebagai peristiwa keluarga yang melibatkan kepentingan dan kehormatan seluruh keluarga besar, sehingga keputusan pernikahan tidak hanya didasarkan pada kehendak individu, tetapi juga pada pertimbangan sosial, ekonomi, dan status keluarga. Meskipun adat ini menekankan pada keharmonisan dan stabilitas keluarga, seringkali dapat menyebabkan konflik dengan hak-hak individu anak yang dijamin oleh Hukum Keluarga Islam.

Dinamika antara Hukum Keluarga Islam dan adat Jawa dalam pemilihan pasangan pernikahan menciptakan suatu bidang interaksi yang kompleks. Di satu sisi, nilai-nilai Islam menekankan pada kebebasan dan hak individu, sementara adat Jawa menekankan pada otoritas orang tua dan keharmonisan keluarga besar. Dalam konteks ini, penting untuk menemukan keseimbangan yang menghormati kedua perspektif tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui dialog terbuka antara anak dan orang tua, dengan memahami bahwa tujuan akhir adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, serta menghormati hak-hak individu dalam kerangka nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

Selain itu, dinamika ini juga perlu dilihat dalam konteks perubahan sosial dan modernisasi. Generasi muda saat ini cenderung memiliki pandangan yang lebih individualistis dan terbuka terhadap berbagai pengaruh budaya global. Sementara itu, generasi orang tua mungkin masih kuat memegang nilai-nilai tradisional dan adat istiadat. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan pengertian timbal balik antara generasi menjadi kunci penting. Melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis, nilai-nilai tradisional dan agama dapat diselaraskan dengan aspirasi dan hak-hak individu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip Islam tentang musyawarah (syura), di mana keputusan yang bijaksana dan adil diambil melalui konsultasi dan konsensus bersama.

Lebih lanjut, implikasi dari peran orang tua dalam pemilihan pasangan menurut adat Jawa terhadap perlindungan hak-hak anak perlu diperhatikan dengan serius. Hak-hak anak untuk memilih pasangan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dalam praktiknya, memastikan bahwa anak-anak memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan mereka sendiri adalah langkah penting dalam mendukung kesejahteraan dan hak-hak individu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan keluarga untuk terus mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menghormati hak-hak anak dalam konteks

pernikahan, baik dari perspektif Hukum Keluarga Islam maupun adat Jawa.

B. Implikasinya Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak

Peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan menurut adat Jawa memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak anak. Dalam tradisi Jawa, orang tua memainkan peran sentral dan seringkali dominan dalam proses pemilihan pasangan untuk anak-anak mereka. Keputusan pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi anak, tetapi juga sebagai tanggung jawab keluarga besar yang mempertimbangkan kehormatan, status sosial, dan kesejahteraan kolektif. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga, sering kali dapat mengabaikan atau membatasi hak-hak individu anak dalam memilih pasangan hidup mereka.

Implikasi utama dari peran dominan orang tua dalam adat Jawa adalah potensi terjadinya konflik antara kehendak orang tua dan hak anak untuk memilih pasangannya sendiri. Hak anak untuk memilih pasangan adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal, termasuk dalam konteks Hukum Keluarga Islam yang menekankan pada kebebasan individu dan keadilan. Ketika orang tua memaksakan pilihan mereka tanpa mempertimbangkan kehendak dan perasaan anak, hal ini dapat mengarah pada pernikahan yang tidak didasari oleh cinta dan kesepakatan sejati. Akibatnya, pernikahan semacam itu berisiko lebih tinggi mengalami konflik rumah tangga, ketidakbahagiaan, dan bahkan perceraian.

Selain itu, tekanan sosial dan kultural yang kuat dari keluarga besar dapat membuat anak merasa terpaksa menerima keputusan orang tua, meskipun mungkin bertentangan dengan keinginannya sendiri. Situasi ini dapat menyebabkan stres psikologis dan mengurangi kualitas hidup anak. Dalam jangka panjang, kurangnya kebebasan dalam memilih pasangan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan mental anak. Hak anak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri adalah aspek penting dari kemandirian dan kebebasan individu yang harus dihormati dan dilindungi.

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah potensi terjadinya diskriminasi berbasis gender dan status sosial dalam pemilihan pasangan pernikahan menurut adat Jawa. Tradisi ini sering kali mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesamaan status sosial, latar belakang keluarga, dan kriteria ekonomi dalam pemilihan pasangan. Hal ini dapat memperkuat hierarki sosial dan mengekalkan ketidaksetaraan gender. Anak perempuan, khususnya, mungkin menghadapi tekanan lebih besar dalam mematuhi keputusan orang tua dan keluarga besar, mengingat peran tradisional mereka dalam masyarakat Jawa yang seringkali lebih subordinat.

Untuk mengatasi implikasi-implikasi tersebut, penting bagi masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak-hak anak dalam konteks pernikahan. Pendidikan dan dialog antar generasi dapat menjadi kunci untuk menjembatani perbedaan antara nilai-nilai tradisional dan hak-hak individu. Selain itu, intervensi dari lembaga-lembaga agama dan hukum dapat membantu memastikan bahwa hak anak untuk memilih pasangan dihormati dan dilindungi. Dengan menggabungkan nilai-nilai adat yang positif dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan Hukum Keluarga Islam, diharapkan peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan dapat tetap relevan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan anak tanpa mengorbankan hak-hak individu mereka.

Terakhir, upaya legislasi dan penegakan hukum juga diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dalam pemilihan pasangan pernikahan. Kebijakan yang memperkuat perlindungan anak dan mendorong praktek-praktek yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia perlu didorong dan diimplementasikan dengan serius. Ini termasuk upaya untuk menghapuskan praktik perjodohan yang merugikan hak-hak anak serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak individu dalam konteks pernikahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan akan lebih seimbang antara menjaga tradisi dan menghormati hak-hak anak sebagai individu yang berdaulat.

C. Peran Pemerintah, Lembaga Sosial, dan Komunitas Lokal dalam Melindungi dan Memastikan Hak-Hak Anak dalam Pemilihan Pernikahan Berdasarkan Adat Jawa

Peran pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lokal sangat penting dalam melindungi dan memastikan hak-hak anak dalam pemilihan pernikahan berdasarkan adat Jawa. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan hak-hak anak dalam konteks pernikahan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan undang-undang yang mengatur hak-hak individu dalam proses pemilihan pasangan, serta menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran hak-hak anak. Penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi.

Selain itu, lembaga sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak juga memiliki peran krusial dalam mendukung hak-hak anak dalam pemilihan pernikahan. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dalam proses pernikahan, serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada anak-anak yang mungkin berada dalam situasi yang rentan atau mengalami tekanan dalam pemilihan pasangan. Program-program pencegahan dan intervensi juga dapat diterapkan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang sama terhadap

informasi, dukungan, dan perlindungan.

Komunitas lokal juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak anak dalam pemilihan pernikahan berdasarkan adat Jawa. Melalui kegiatan-kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan, komunitas dapat mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak-hak individu. Forum-forum diskusi dan pertemuan komunitas juga dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan isu-isu terkait hak-hak anak dalam pernikahan dan mencari solusi bersama untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dan dihormati dalam proses tersebut.

Dengan melibatkan pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lokal secara aktif dalam upaya perlindungan hak-hak anak dalam pemilihan pernikahan berdasarkan adat Jawa, diharapkan bahwa akan tercipta lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung bagi anak-anak untuk dapat mengekspresikan keinginan dan hak-hak mereka secara bebas. Kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak ini juga akan memperkuat upaya-upaya perlindungan anak secara menyeluruh dalam masyarakat.

Dalam kerangka kerja yang lebih luas, penting bagi pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lokal untuk bekerja sama secara sinergis dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini meliputi kampanye penyuluhan, pelatihan bagi tenaga kerja yang berhubungan dengan anak-anak, pendirian pusat-pusat layanan bagi korban, dan penguatan mekanisme penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak. Dengan kolaborasi yang kokoh dan berkelanjutan antara berbagai pihak terkait, diharapkan bahwa akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak dalam menjalani proses pemilihan pernikahan yang sehat dan bermartabat.

KESIMPULAN

Dari analisis mengenai perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap dinamika peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan menurut adat Jawa serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak, beberapa kesimpulan dapat diambil. Pertama, terdapat perbedaan pandangan antara Hukum Keluarga Islam yang menekankan pada kebebasan individu dalam pemilihan pasangan dengan adat Jawa yang sering kali menempatkan peran dominan orang tua dalam proses tersebut. Kedua, peran orang tua dalam pemilihan pasangan dapat berpotensi mengabaikan atau membatasi hak-hak individu anak, yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Ketiga, implikasi dari dominasi orang tua dalam proses pemilihan pasangan dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan anak.

Dalam konteks ini, penting untuk mengambil langkah-langkah yang mempromosikan kesetaraan hak dan kesejahteraan anak dalam pemilihan pasangan pernikahan. Hal ini dapat

dilakukan melalui pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga sosial, komunitas lokal, serta keluarga itu sendiri. Upaya ini meliputi penyuluhan, pelatihan, dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak serta membangun norma-norma yang mendukung kebebasan individu dan keadilan dalam pemilihan pasangan.

Dengan demikian, perlindungan hak-hak anak dalam konteks pemilihan pasangan pernikahan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama antara berbagai pihak. Hanya dengan mengakui dan menghormati hak-hak individu anak serta mendorong proses pemilihan pasangan yang berdasarkan kesepakatan dan kebebasan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2015). "Falsafah Hukum Islam (Jilid 2: Keluarga)." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, E. (2010). "Keluarga Jawa: Konstruksi, Kultur, dan Praktik." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli, A., & Hidajat, N. (2009). "Budaya Jawa dalam Perspektif Islam: Studi Tentang Nilai-nilai Budaya Jawa." Yogyakarta: Diva Press.
- Fitri, F. (2018). "Adat Jawa: Kontinuitas, Discontinuitas, dan Perubahan." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdani, M. (2013). "Konflik Gender dalam Keluarga Jawa: Studi Kasus di Desa Sumogawe, Kabupaten Semarang." *Jurnal Lisanally*, 3(2), 113-127.
- Hasan, M. N. (2016). "Dinamika Perubahan Sosial Budaya dan Tradisi Islam dalam Masyarakat Jawa." *Jurnal Pembangunan Masyarakat Islam*, 1(1), 1-20.
- Kuntowijoyo. (1992). "Adat Jawa dan Agama Islam: Kajian Sosiologi Historis atas Hukum Perdata Islam." Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Latief, H. (2019). "Perkawinan Adat Jawa: Antara Tradisi dan Modernitas." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(2), 214-227.
- Mu'ti, A. (2010). "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Tanzim*, 7(1), 79-93.
- Nasution, M. N. (2014). "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal Yudisial*, 7(2), 187-201.